

# **Pertimbangan Turki Menerima Keanggotaan Swedia Di NATO Tahun 2024**

**Azzahra Egidia Nuraini  
Rahmi Fitriyanti**

*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

e-mail: [azzahraegidian123@gmail.com](mailto:azzahraegidian123@gmail.com)  
[rahmi.fitriyanti@uinjkt.ac.id](mailto:rahmi.fitriyanti@uinjkt.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the reasons behind Turkey's acceptance for Sweden's accession to NATO in 2024. Sweden applied to be a member of NATO since 2022, this is quite a surprising move from Sweden considering that Sweden is known for its neutral foreign policy. Sweden's membership was delayed due to Turkey's objection and NATO has a regulations which require all members to agree when a new country applies for membership. However, Turkey finally accepting Sweden's membership to NATO after suspend it for two years. In analyzing the reasons behind Turkey's acceptance for Sweden's accession to NATO in 2024, the theoretical framework that will be used is rational choice theory from Coleman, national interest concept from Nuechterlein and national role concept from Holsti. The research method that will be used is a qualitative method from primary and secondary resources, where the data will be collected through literature study, using various sources. The research findings indicate that due to several reasons, there has been a change in the intensity of Turkey's national interests as well as Turkey's interests regarding its identity and role in the international system drove Turkey to accepting Sweden's accession to NATO.*

**Keywords: Turki, Sweden, NATO, National Interest, National Role**

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan Turki menerima keanggotaan Swedia ke NATO tahun 2024. Swedia mengajukan keanggotaan ke organisasi NATO semenjak tahun 2022. Hal ini cukup mengejutkan lantaran Swedia merupakan negara yang terkenal dengan kebijakan luar negeri yang netral. Keanggotaan Swedia terhambat karena ada penentangan dari Turki dan di NATO berlaku peraturan yang mengharuskan semua anggota setuju ketika ada pengajuan keanggotaan negara baru. Akan tetapi, Turki pun menerima keanggotaan Swedia ke NATO setelah menangguhkan keanggotaan Swedia selama dua tahun. Dalam menganalisis pertimbangan Turki menerima keanggotaan Swedia ke NATO tahun 2024, kerangka teoritis yang akan digunakan adalah teori pilihan rasional, konsep kepentingan nasional menurut Nuechterlein serta konsep peran nasional menurut Holsti. Metode penelitian adalah metode kualitatif dari sumber data primer dan sekunder, data akan dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan menggunakan berbagai sumber dan referensi bacaan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan berbagai pertimbangan rasional, terjadi perubahan intensitas kepentingan nasional Turki serta kepentingan Turki terhadap peran negaranya di level internasional mendorong penerimaan Turki terhadap keanggotaan Swedia ke NATO.*

**Kata Kunci: Turki, Swedia, NATO, Kepentingan Nasional, Peran Nasional**

## **Pendahuluan**

*North Atlantic Treaty Organization* (NATO) merupakan aliansi militer berbasis pakta atau perjanjian yang tentu memiliki aturan khusus mengenai klausul keanggotaan. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh NATO, bagi negara yang ingin mengajukan keanggotaan harus berpartisipasi aktif terlebih dahulu dalam *Membership Action Plan* (MAP) (Brooke-Holland, 2024). MAP ini merupakan salah satu program dari NATO yang dikhususkan bagi negara yang ingin bergabung ke dalam aliansi, tetapi keaktifan dan partisipasi negara dalam MAP tidak serta merta memberikan jaminan diterima menjadi anggota aliansi bagi negara yang mengajukan keanggotaan. Negara yang berpartisipasi dalam MAP akan mengajukan persiapan mereka untuk menjadi negara anggota NATO, termasuk di dalamnya mencakup aspek politik, ekonomi, pertahanan, sumber daya, keamanan, dan hukum (NATO, 2024). Setelah negara tersebut memenuhi semua persyaratan keanggotaan NATO, akan ada tahapan akses. Dalam tahapan ini, semua anggota NATO harus menyetujui dan meratifikasi protokol akses tersebut (Brooke-Holland, 2024).

Kedua tahapan tersebut akan dihadapi oleh negara yang akan mengajukan keanggotaan negaranya ke NATO. Salah satu contoh kasus pengajuan keanggotaan negara ke dalam NATO adalah Hungaria, Ceko, dan Polandia yang bergabung ke NATO pada 1999 yang masuk ke dalam gelombang pertama perluasan NATO pasca Perang Dingin. Tiga negara tersebut diundang untuk memulai pembicaraan mengenai akses pada KTT di Madrid 1997. Mereka pun resmi menjadi anggota pada 12 Maret 1999 yang merupakan negara-negara mantan anggota Pakta Warsawa yang resmi menjadi anggota NATO (NATO, 2024). Dengan agenda perluasan NATO sejak berakhirnya Perang Dingin, aliansi ini semakin memperluas keanggotaannya ke berbagai wilayah. Agenda perluasan NATO pada awalnya menuai kontroversi, karena dianggap terlalu banyak resiko dan pengeluaran biaya yang berlebihan. Perluasan ini juga membawa aliansi ke dalam persaingan. Bahkan, dalam beberapa kasus konfrontasi langsung dengan Rusia, dan memicu melemahnya keamanan di kawasan Eropa-Atlantik (German, 2017). Meningkatnya ancaman ketegangan dengan Rusia bukan hanya menjadi kekhawatiran bagi negara anggota NATO saja, tetapi juga bagi negara-negara di wilayah Eropa Utara dan Laut Baltik.

Salah satu negara yang akhirnya mengajukan keanggotaannya ke NATO adalah Swedia. Walaupun terkenal dengan kebijakannya yang mengedepankan 'netralitas', Swedia tetap mengajukan keanggotaan mereka di tengah naiknya isu invasi Rusia ke Ukraina (Wieslander, 2021). Langkah Swedia ini cukup mengejutkan, terlebih Swedia telah menerapkan kebijakan netralitas mereka selama lebih dari 200 tahun lamanya. Pengajuan keanggotaan ke NATO menandakan bahwa Swedia mendeklarasikan negaranya tidak lagi menerapkan kebijakan netralitas tersebut (Brommesson et al. 2022). Keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO juga sulit dipahami karena masyarakat Swedia tidak merasa terancam oleh negara lain, dan negara mereka tidak pernah terlibat langsung dalam situasi perang selama lebih dari 200 tahun (Persson dan Widmalm, 2023). Pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO pada 2022 ternyata tidak mendapatkan respon yang baik dari semua negara anggota NATO. Dalam kasus Swedia, Turki menjadi negara yang menunda persetujuan untuk pengajuan keanggotaan Swedia pada 2022. Beberapa pertimbangan di balik penundaan yang dilakukan oleh Turki terhadap pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO adalah sebagai berikut: (1) Keputusan Swedia untuk tidak mengakui kelompok PKK (Partai Pekerja Kurdistan)/YPG (Unit Perlindungan Rakyat) asal Suriah sebagai kelompok teroris seperti yang diakui oleh Turki; (2) Pembakaran kitab suci Al-Qur'an di Swedia pada 2023; (3) Kekhawatiran Turki akan menurunnya hubungan Turki dengan Rusia (Tuncer, 2022).

Selain aturan NATO yang mengharuskan semua negara untuk setuju terhadap pengajuan keanggotaan negara baru, Turki sudah sejak dahulu memiliki hubungan yang erat dengan NATO dan memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam aliansi militer tersebut. Mengingat NATO,

khususnya Amerika Serikat, menganggap Turki memiliki peran penting dalam NATO, terutama karena lokasi mereka yang strategis. Turki yang awalnya dianggap sebagai negara anggota *flank* atau anggota 'sayap', berubah menjadi anggota *frontline* atau anggota 'garis depan'. Hal ini menandakan pentingnya posisi dan potensi Turki bagi NATO (Güvenç dan Özel, 2012). Maka, menanggapi penangguhan keanggotaan Swedia oleh Turki yang merupakan negara anggota yang cukup berpengaruh di NATO, memunculkan pertanyaan pertimbangan Turki menerima keanggotaan Swedia ke NATO pada 2024. Mengingat, penangguhan keanggotaan Swedia oleh Turki terbilang cukup lama. Perubahan keputusan Turki tersebut menjadikan topik ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

### **Tinjauan Pustaka**

Isu perluasan NATO menghangat di dunia internasional sejak Perang Dingin berakhir, khususnya bagi negara-negara yang tertarik untuk bergabung ke dalam pakta pertahanan tersebut. Reiter (2001) menjelaskan bahwa isu perluasan ini menimbulkan perdebatan. Pendukung isu perluasan NATO berargumen bahwa isu ini dapat membantu menciptakan kestabilan di Eropa Utara, terlebih dengan kekhawatiran terhadap kekuatan Rusia. Namun, menurut German (2017), setelah Perang Dingin berakhir, kebijakan perluasan NATO justru membawa aliansi untuk berkompetisi, bahkan dalam beberapa kasus konfrontasi dengan Rusia. Maka, dengan peningkatan ketegangan tersebut, isu perluasan NATO bahkan mencapai kawasan Eropa Utara.

Berdasarkan penelitian dari Vanhanen (2023), perluasan NATO ke Eropa Utara atau kawasan Nordik merupakan pertama kali dalam sejarah modern yang mana semua negara di kawasan Eropa Utara tergabung dalam satu aliansi dengan kewajiban yang mengikat (*binding*). Salah satu negara yang khawatir akan dampak perluasan ancaman adalah Swedia. Hal ini didukung dengan penelitian dari Simons et al.(2019) yang mengungkapkan perluasan ancaman Rusia di kawasan Laut Baltik memunculkan perdebatan mengenai kebijakan netralitas yang telah diterapkan selama lebih dari 200 tahun. Swedia yang sudah menjadi mitra NATO sejak 1994 mempertimbangkan kembali keputusan untuk menjadi anggota NATO sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wieslander (2022) bahwa dengan Swedia bergabung ke NATO, kemungkinan akan mengurangi tingkat ketidakamanan di kawasan. Namun, pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO menemui hambatan karena Turki menanggukkan pengajuan keanggotaan Swedia.

Turki memiliki posisi penting di NATO mengingat negara ini telah menjadi bagian dari NATO sejak 1952. Menurut Tuncer (2022), Turki memiliki opsi mengenai pengajuan keanggotaan Swedia dan Finlandia ke NATO karena Turki memegang kartu truf penting dalam keanggotaan NATO, yaitu melalui hak veto. Tuncer (2022) juga menjelaskan pertimbangan Turki menanggukkan keanggotaan Swedia karena beberapa pertimbangan yaitu sikap Swedia terhadap organisasi PKK/YPG dan insiden pembakaran Al-Qur'an di Swedia yang dapat mempersulit Turki untuk memberikan dukungan positif terhadap Swedia. Beberapa negara pernah mengalami penangguhan keanggotaan, seperti yang dijelaskan oleh Arbuthnot (2008) bahwa Ukraina dan Georgia juga pernah gagal menjadi anggota NATO. Tetapi dalam kasus Ukraina dan Georgia bukan dikarenakan ada negara anggota yang menolak, melainkan kedua negara tidak melewati tahap MAP. Kembali ke kasus Swedia, Turki pun menerima keanggotaan Swedia ke NATO pada awal 2024.

### **Kerangka Teoritis**

#### **Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)**

Teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) menurut James S. Coleman (1966) adalah bagaimana individu berperilaku dalam konteks tindakan kolektif. Coleman menjelaskan lebih

lanjut bahwa individu memperhitungkan setiap kemungkinan secara rasional untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam konteks kepentingan kolektif, seorang individu mungkin merasa ingin berkontribusi dalam suatu isu secara kolektif. Hal ini dinamakan dengan kepentingan kolektif. Maka, lebih lanjut, Coleman juga menegaskan bahwa kepentingan kolektif tersebut didasarkan pada suatu aksi yang dilakukan oleh individu yang bertindak rasional. Hasilnya, keputusan tersebut membawa keuntungan bagi yang lain, karena telah menjadi bagian dari kepentingan kolektif. Dengan demikian, dalam rangka pemenuhan kepentingan kolektif tersebut, dibutuhkan dukungan sosial berupa institusi ataupun norma (Coleman, 1966). Maka, dengan analisis rasional individu yang juga merupakan bagian dari kepentingan kolektif, ditambah dengan dukungan struktur sosial, maka pengambilan keputusan yang dibuat akan menciptakan keputusan yang realistis dan rasional.

### **Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest Concept*)**

Konsep kepentingan nasional (*national interest concept*) menurut Donald E. Nuechterlein (1976) bahwa kepentingan nasional merupakan dasar bagi tiap negara untuk menentukan aspirasi dan tujuannya di level internasional. Terdapat empat kepentingan nasional mendasar bagi negara menurut Nuechterlein, di antaranya yaitu: (1) Kepentingan keamanan, yaitu perlindungan bagi rakyat dan negara terhadap ancaman dari negara lain; (2) Kepentingan ekonomi, peningkatan perekonomian suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain; (3) Kepentingan *world order*, yaitu pemeliharaan sistem ekonomi dan politik internasional agar negara-negara dapat merasa aman; (4) Kepentingan ideologi, perlindungan terhadap seperangkat nilai yang dipercaya oleh suatu negara baik untuk diterapkan secara internasional.

Selain mengkategorikan kepentingan nasional, Nuechterlein juga menjelaskan prioritas dari kepentingan nasional. Proses penentuan intensitas dan prioritas kebijakan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti: (1) *Survival issues*, semakin suatu isu membutuhkan tindakan cepat, maka isu tersebut akan menjadi prioritas suatu negara, biasanya berfokus pada kepentingan keamanan; (2) *Vital issues*, mencakup bidang lain seperti ekonomi, *world order*, dan ideologi, dalam *vital issues* biasanya negara memiliki waktu untuk mencari bantuan dari sekutunya; (3) *Major issues*, ketika kondisi politik, ekonomi, dan ideologi suatu negara dipengaruhi oleh suatu peristiwa di level internasional; dan (4) *Peripheral issues*, kondisi ketika negara tidak dipengaruhi oleh suatu peristiwa di level internasional, tetapi kepentingan suatu negara di negara lain bisa jadi terancam.

### **Konsep Peran Nasional (*National Role Concept*)**

Konsep peran nasional (*national role concept*) diperkenalkan oleh K.J. Holsti (1970). Dalam konsep peran nasional, peran seorang pemimpin negara dalam menentukan keputusan tertentu dan memiliki kapabilitas untuk mengubah keputusan yang telah ia buat (Kara dan Sözen, 2016). Maka, persepsi dari seorang pemimpin dan pembuat kebijakan merupakan determinan utama dari konsep peran nasional yang diperkenalkan oleh Holsti. Terdapat tiga konsep utama dalam konsep peran nasional, yaitu: (1) *Role performance*, keputusan dan aksi yang harus diimplementasikan; (2) *Role conceptions*, prinsip yang membantu pengambilan keputusan; (3) *Role expectations*, ekspektasi pemimpin terhadap peran negaranya di level internasional. Maka, dalam konteks penerimaan keanggotaan Swedia di NATO oleh Turki, bisa saja Turki memahami peran negaranya telah berubah di level internasional. Ekspektasi pemimpin Turki mengenai peran negara dan posisi apa yang ingin dicapai di level internasional dapat mempengaruhi *output* berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin. Dengan demikian, perubahan keputusan Turki menerima keanggotaan Swedia di NATO terjadi karena adanya ekspektasi yang mendorong implementasi pada perubahan keputusan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini berangkat dari perubahan keputusan Turki mengenai keanggotaan Swedia di NATO. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Dalam menjelaskan pertimbangan Turki menerima keanggotaan Swedia ke NATO pada 2024, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari konferensi pers resmi yang diadakan oleh NATO dan Rapat Parlemen Turki yang membahas mengenai penerimaan keanggotaan Swedia. Lalu, data sekunder diperoleh berdasarkan sumber sekunder, seperti, jurnal, buku, artikel, dan dokumen atau arsip.

## Hasil dan Pembahasan

### Keanggotaan Turki di NATO

Turki memiliki sejarah yang cukup panjang bersama NATO. Kedekatan Turki dan Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu pertimbangan Turki bergabung ke NATO pada 1952 (Yılmaz, 2012), dan menjadi dasar yang menguatkan hubungan kedua negara serta menguatkan posisi Turki di NATO. AS berpandangan bahwa kekuatan militer Turki dapat membantu NATO dalam merancang pertahanan di kawasan Mediterania (Yılmaz, 2012). Kehadiran Turki di Barat penting bagi identitas nasional Turki agar bisa diakui oleh Barat, juga untuk meneguhkan pengaruh Turki di kawasan dan global (Oğuzlu, 2013). Sejak awal, Turki memiliki posisi yang kuat di NATO karena pengaruh kapabilitas *hard-power* yang dimiliki oleh Turki. Selain itu, legitimasi identitas Turki di Barat mampu menjamin komitmen Turki terhadap NATO (Oğuzlu, 2013).

Hubungan Turki dan AS serta NATO tidak selalu berjalan dengan baik. Walaupun pada awal keanggotaan Turki di NATO, hubungan AS dan Turki terbilang cukup erat, dengan AS yang rutin memberikan dukungan militer (Beyoghlou, 2020). Namun, dengan kebangkitan Partai *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) dan Erdogan selaku pendiri partai, kecenderungan otoriter Turki berubah dari yang sebelumnya bersifat militer menjadi kerakyatan (Beyoghlou, 2020). AKP muncul sebagai kekuatan politik domestik berbasis Islam di Turki, yang memadukan Islam dengan nilai demokratis modern sehingga identitas Islam yang melekat di Turki menjadi poros budaya dalam hubungannya dengan NATO (Nes, 2023).

Di bawah pemerintahan AKP, Turki membangun hubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah, yang justru menyebabkan penurunan hubungan dengan aliansi Barat, yaitu AS dan NATO. Salah satu kasus penurunan hubungan Turki dan Barat adalah ketika Turki menolak invasi NATO ke Libya pada 2011 (Beyoghlou, 2020). Oleh karena itu, muncul kecenderungan Turki menjauh dari aliansi di Barat dan memperkuat hubungan dengan Rusia dan China, serta menekankan kebijakan di kawasan Timur Tengah (Nes, 2023). Ditambah, sebagai negara mayoritas Muslim dengan demokrasi sekuler, serta posisi Turki di Barat dan politik global, menjadikan Turki sebagai panutan bagi negara-negara Arab (Umar, 2022).

Keanggotaan Turki di NATO juga sering dipertanyakan oleh berbagai negara anggota NATO. Mengingat hasil keputusan NATO berupa konsensus, Turki terkadang menjadi negara yang menentang berbagai keputusan NATO. Beberapa kasus penolakan Turki, misalnya pada 2009, ketika Turki menolak penunjukkan ketua baru NATO yang berasal dari Denmark dengan pertimbangan Denmark merupakan negara yang bersimpati terhadap Kelompok Teroris Kurdi (Crowley dan Erlanger dalam New York Times, 2022). Pada 2022, Turki kembali menolak pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO. Hal ini tidak mengejutkan bagi anggota NATO lainnya. Dengan kedekatan Turki dengan Rusia, maka penolakan keanggotaan Swedia oleh Turki dapat

dianggap sebagai keuntungan bagi Rusia, mengingat Rusia juga memiliki kepentingan di kawasan. Hal ini juga dapat menjadi dilema bagi NATO, karena Turki memiliki posisi yang penting di dalam aliansi tersebut. Dengan identitas Turki sebagai negara Barat dan Islam yang juga dekat dengan negara-negara di Timur Tengah, maka Turki dapat dianggap sebagai kepanjangan tangan dari NATO untuk kawasan Timur Tengah dan Laut Hitam (Crowley dan Erlanger dalam New York Times, 2022).

Akan tetapi, di sisi lain, Turki di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan memunculkan perdebatan mengenai apakah NATO lebih baik tanpa Turki atau tidak. Mengingat Turki di bawah Erdogan yang cenderung dekat dengan Rusia dikhawatirkan dapat melemahkan kepentingan NATO sebagai aliansi militer. Tetapi, NATO merupakan aliansi militer, dimana Turki juga merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di NATO, sehingga posisi Turki pada dasarnya krusial bagi posisi NATO karena memegang peran penting di aliansi tersebut (Crowley dan Erlanger dalam New York Times, 2022). Walaupun keanggotaan Turki di NATO bisa dibilang mengalami fluktuasi, tetapi kenyataannya Turki masih memegang posisi penting di NATO. Hal ini membuktikan bahwa baik Turki dan NATO masih saling membutuhkan dan masih memiliki misi serta tujuan bersama.

### **Penolakan Awal Turki pada Pengajuan Keanggotaan Swedia**

Setelah lebih dari 200 tahun mempertahankan kebijakan netralitas, Swedia pada 2022 memutuskan untuk mengajukan keanggotaan ke NATO, yang juga menandakan perubahan arah Swedia yang tidak lagi menjadi negara *non-alignment*. Keputusan Swedia tersebut membawa banyak perdebatan di masyarakat Swedia, terlebih kebijakan netralitas sudah dianggap sebagai identitas bangsa Swedia (Brommesson, et al.2022), membuat perdebatan mengenai kebijakan ini cukup menarik.

Akan tetapi, dengan melihat kedekatan Swedia dengan NATO yang sudah menjadi mitra dalam *Partnership for Peace* (PfP) sejak 1994, terlebih keterlibatan Swedia dalam beberapa operasi keamanan NATO telah membawa Swedia untuk semakin mendekati diri dengan aliansi militer tersebut (Ydén, et al.2019). NATO memandang pengajuan keanggotaan Swedia sebagai bagian dari upaya perluasan NATO ke kawasan Eropa Utara dan Laut Baltik, dan menyambut baik keputusan Swedia untuk menjadi bagian dari NATO. Manuver yang dilakukan dengan Rusia dengan invasi ke Ukraina (Vanhanen, 2023) menjadi salah satu faktor utama Swedia untuk mengakhiri kebijakan netralitas dan menjadi bagian dari NATO. Swedia pun mendeklarasikan intensinya untuk menjadi anggota NATO pada Mei 2022, mengikuti jejak negara Nordik lain, yaitu Finlandia yang beberapa hari sebelumnya mengajukan keanggotaan terlebih dahulu (Hernandez, 2022). Namun, berdasarkan Protokol NATO dalam Akses Kerajaan Swedia yang ditandatangani oleh negara-negara anggota NATO pada Juli 2022, Turki menjadi negara yang menolak dan tidak menandatangani protokol akses tersebut (NATO, 2022).

Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan Turki untuk menolak keanggotaan Swedia di NATO di antaranya yaitu: (1) Turki menganggap Swedia tidak menghormati kepentingan nasional Turki mengenai kelompok yang dianggap teroris oleh pemerintah Turki, yaitu Partai Pekerja Kurdistan (PKK), dengan menunjukkan simpati terhadap kelompok tersebut; (2) Insiden pembakaran Al-Qur'an di Swedia, dimana politikus sayap kanan Swedia, Erasmus Paludan, juga ikut terlibat di dalam insiden. Ditambah dengan kepolisian Swedia yang memberikan izin untuk aksi pembakaran tersebut sebagai dalih kebebasan berekspresi; (3) Kemungkinan hubungan Turki dan NATO akan renggang jika Turki menerima keanggotaan Swedia (Tuncer, 2022; Reuters, 2023).

Pertimbangan pertama mengenai kelompok teroris Kurdistan, terdapat implikasi historis bagi Turki untuk mengklaim kelompok tersebut sebagai kelompok teroris. Penduduk Kurdi sering mendapatkan perlakuan berbeda dari pemerintah Turki, sehingga mereka merasa tertindas. Kelompok PKK pun melakukan kudeta militer pada 1980, dilanjut pada era 1990-an, kelompok ini juga melakukan upaya insurgensi kepada pemerintah Turki (Akkaya, 2020). Penduduk Kurdi sering mengalami dideferensiasi secara politik dan ekonomi terhadap hak-hak sipil mereka (Savran, 2020). Konflik di antara kelompok PKK dengan pemerintah Turki yang berlarut-larut ini menuntut pemerintah Turki untuk memberikan label kelompok PKK tersebut sebagai kelompok teroris.

Pertimbangan kedua mengenai pembakaran Al-Qur'an oleh Salwan Momika. Pada insiden ini juga terdapat seorang politikus sayap kanan Swedia bernama Erasmus Puldan (BBC, 2023). Turki di bawah pemerintahan Partai AKP dan Erdogan, telah berkembang menjadi negara yang mengedepankan identitas Islam. Insiden pembakaran Al-Qur'an ini tentu menyulut kemarahan dari Turki. Pada dasarnya, Swedia merupakan negara sekuler yang mengedepankan kebebasan berekspresi, tetapi Erdogan melihat aksi pembakaran tersebut tidak bermoral dan berpandangan bahwa insiden ini bukan berdasarkan dalih "kebebasan berekspresi" tetapi lebih kepada ujaran kebencian dan "tindakan anti-Islam" (BBC, 2023).

Pertimbangan ketiga mengenai kekhawatiran Turki mengenai hubungannya dengan Rusia. Turki di bawah kepemimpinan Erdogan dan Partai AKP bukan hanya membangun hubungan yang baik dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, tetapi juga membangun hubungan baik dengan Rusia. Salah satu pertimbangan perubahan kebijakan luar negeri Turki untuk cenderung ke Rusia, karena kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan di Timur Tengah (Nes, 2023).

Perubahan kebijakan Turki di bawah pemerintahan Partai AKP dan Erdogan menunjukkan terdapat fluktuasi hubungan antara Turki dengan aliansi di Barat. Hal ini juga yang dapat memengaruhi bagaimana Turki berperan dan berperilaku di level internasional. Bisa dilihat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut memengaruhi Turki untuk berperilaku, yaitu dengan menolak keanggotaan Swedia di NATO. Akan tetapi, mengingat negara berperilaku secara dinamis dan pemimpin negara bisa saja mengubah keputusannya, Turki juga bisa mengubah keputusannya terhadap keanggotaan Swedia di NATO. Hal ini bisa dibuktikan dengan Turki yang mengubah keputusannya dengan menerima Swedia menjadi anggota NATO pada 2024.

Berbagai pertimbangan tersebut bisa dikaji menggunakan teori pilihan rasional menurut Coleman. Perubahan keputusan Turki bisa dipahami sebagai bentuk dari kepentingan kolektif yang berdasarkan pikiran rasional seorang individu. Pemimpin merupakan individu yang memiliki pikiran rasional. Dengan didukung oleh anggota Parlemen Turki dan berbagai pertimbangan dari pengaruh eksternal, maka pilihan yang rasional untuk dibuat adalah dengan Turki mengubah keputusannya terkait keanggotaan Swedia di NATO. Keputusan tersebut dibuat oleh individu atas nama kepentingan kolektif negara Turki dan didukung oleh struktur sosial di Turki sehingga memunculkan aksi berupa perubahan keputusan.

### **Penerimaan Keanggotaan Swedia ke NATO oleh Turki Tahun 2024**

Pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO pada 2022 yang sebelumnya ditangguhkan oleh Turki menemukan titik terang. Pada 24 Januari 2024, Parlemen Turki mengadakan rapat parlementer yang membahas persetujuan Proposal Aksesori Kerajaan Swedia. Berdasarkan hasil rapat parlemen, dari total 346 anggota parlemen, sebanyak 287 anggota parlemen menyetujui proposal aksesori Swedia, 55 anggota parlemen menolak, dan empat abstain (New York Post, 2024). Peresmian keanggotaan Swedia menjadi anggota NATO juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bersama dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada

*joint press statements* yang diselenggarakan pada 11 Maret 2024 (NATO News, 2024). Pada *joint press statements* tersebut, Jens Stolterbeeg menyatakan: “Dear Prime Minister Kristersson, it is an honour to welcome you today to the NATO Headquarters because this is truly an historic day ... Sweden has taken its rightful place at NATO’s table under the shield of Article 5 protection – the ultimate guarantee of our freedom and security. Joining NATO is good for Sweden, good for stability in the North and good for the security of our whole alliance. Sweden has long been a partner, now you are an ally with all the benefits and responsibilities that this brings ... After more than 200 years of neutrality, you are joining the strongest and most successful military alliance in history. So welcome to NATO, it’s great to have you here.” Pertemuan tersebut secara resmi menandakan penerimaan keanggotaan Swedia oleh NATO yang juga ditandai dengan pengibaran bendera Swedia di Markas Besar NATO di Brussels, Belgia.

Peresmian ini menjadi lembaran baru bagi aliansi militer, di mana NATO berhasil memperluas keanggotaannya hingga ke wilayah Eropa Utara dan Laut Baltik. Namun, di balik peresmian keanggotaan Swedia tersebut, perubahan keputusan Turki ini cukup menarik mengingat Turki menolak Swedia dengan berbagai pertimbangan berdasarkan kepentingan nasional Turki. Analisis perubahan keputusan Turki terhadap protokol akses Swedia ini dapat dianalisis dengan menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Nuechterlein dan konsep peran nasional menurut Holsti.

Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional adalah keinginan suatu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang mencakup lingkungan eksternal (Nuechterlein, 1976). Pemimpin sebagai pembuat kebijakan memiliki persepsi terhadap suatu isu di level internasional dan bisa saja mengubah persepsinya mengenai isu tertentu. Hal ini merupakan gambaran dari seorang pemimpin tentang bagaimana negaranya dapat berorientasi atau berfungsi di sistem internasional. Perubahan keputusan Turki mengenai keanggotaan Swedia jika dianalisis berdasarkan konsep kepentingan nasional Nuechterlein dapat dipahami sebagai perubahan kepentingan nasional Turki. Nuechterlein membagi kepentingan ke dalam beberapa bentuk dan intensitas, sehingga dapat diasumsikan Turki mengubah keputusannya dikarenakan ada proses perubahan intensitas kepentingan.

Pertama, kepentingan keamanan. Peningkatan ketegangan dengan Rusia tentu membawa kekhawatiran bagi keamanan negara di sekitarnya. Meskipun Turki memiliki hubungan yang baik dengan Rusia, tetapi Turki tetap saja merupakan bagian dari NATO yang merupakan aliansi militer yang menganggap Rusia sebagai salah satu ancaman terbesar bagi negara-negara anggota. NATO tentu membutuhkan amunisi dan kekuatan militer yang banyak dan mumpuni, sehingga dengan Turki yang menerima keanggotaan Swedia di NATO, mampu mendorong peningkatan kapasitas militer NATO. Terlebih dengan adanya isu perluasan NATO hingga kawasan Eropa Utara, maka akan meningkatkan pertahanan kolektif NATO, termasuk memperkuat keamanan negara Turki, dan pada dasarnya mampu membuka peluang bagi kedua negara untuk membangun kerja sama militer.

Kedua, kepentingan ekonomi. Keinginan Turki untuk berintegrasi dengan Uni Eropa menjadi salah satu pendorong utama bagi Turki untuk menerima keanggotaan Swedia ke NATO. Turki secara tegas menekankan bahwa jika ingin menjadi anggota NATO, maka Swedia harus mendukung akses Turki ke Uni Eropa. Hal ini menjadi salah satu motif Turki agar dapat bergabung ke dalam Uni Eropa dengan sistem perekonomian negara anggota yang sudah terintegrasi. Selain itu, dengan dukungan dari Swedia agar Turki dapat diterima di Uni Eropa, hal ini dapat menjadi langkah positif bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara keduanya.

Ketiga, kepentingan *world order* (politik). Mengingat posisi Turki di NATO sempat dipertanyakan oleh negara-negara anggota yang lain, penerimaan Swedia menjadi anggota NATO dapat menjadi kesempatan bagi Turki untuk memperkuat posisi mereka di NATO. Turki dapat memastikan kepada negara-negara anggota NATO lainnya bahwa mereka masih memiliki pengaruh yang besar dan masih relevan bagi NATO. Selain itu, dengan penerimaan ini juga dapat membangun hubungan antara Turki dan Swedia sehingga dapat memperkuat posisi Turki dalam komunitas internasional.

Keempat, kepentingan ideologi. Pemberian label kelompok teroris kepada kelompok PKK oleh pemerintah Turki merupakan salah satu komitmen Turki untuk menangkal gerakan radikalisme di negaranya. Hal ini sudah menjadi nilai sosial di dalam negara Turki. Dengan penerimaan Swedia ke NATO, Turki berharap bahwa Swedia akan menghormati nilai sosial negara Turki dan meningkatkan kerja sama antara Turki dan Swedia untuk menangkal gerakan terorisme.

Melihat keuntungan yang diperoleh Turki jika menerima Swedia di NATO, maka ini dapat mendorong Turki untuk mengubah intensitas dan prioritas isu keanggotaan Swedia di NATO menjadi isu yang dianggap lebih penting. Bisa saja Turki pada awalnya menganggap isu keanggotaan Swedia di NATO merupakan isu *peripheral* atau isu *major*, yakni tidak akan mengganggu kepentingan nasional Turki walaupun mereka menerima keanggotaan tersebut. Namun, mengingat prospek positif bagi kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan *world order*, dan kepentingan ideologi Turki yang meningkat jika mereka menerima keanggotaan Swedia di NATO, maka Turki pun mengubah intensitas isu tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kepentingan nasional Turki dalam penerimaan Swedia, maka Turki pun mengubah intensitas isu menjadi isu vital, sehingga mendorong *output* yang berupa perubahan keputusan Turki untuk menerima Swedia menjadi anggota NATO.

Lalu, berdasarkan konsep *national role* Holsti, dapat diasumsikan bahwa perubahan keputusan Turki mengenai keanggotaan Swedia bisa terjadi karena adanya perubahan persepsi seorang pemimpin mengenai peran negaranya di sistem internasional. Hal ini juga selaras dengan konsep kepentingan nasional Nuechterlein sebelumnya, bahwa keputusan yang dikeluarkan Turki dikarenakan adanya perubahan intensitas pada kepentingan nasional Turki. Bagi Turki, identitas nasional mereka penting, baik itu identitas sebagai negara muslim dan negara Barat. Penolakan Turki pada Swedia terkait alasan pembakaran Al-Qur'an bisa dipandang juga merupakan strategi Turki untuk mencapai *national role* sebagai negara muslim. Hal ini karena Turki di bawah pemerintahan Erdogan membangun kembali hubungan yang baik dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, sehingga insiden pembakaran Al-Qur'an di Swedia bisa menjadi pemicu bagi Turki untuk membuktikan identitas Islamnya dan mencapai *role* sebagai *leader of muslim world* dan *defender of the muslim world* (Kara dan Sözen, 2016).

Dengan *role* tersebut, Turki merasa bertanggung jawab untuk menangani situasi yang berhubungan dengan muslim di seluruh dunia, sehingga insiden pembakaran tersebut mendorong reaksi Turki untuk bersikap sebagai *leader of the muslim world* dan *defender of the muslim world* dengan menolak keanggotaan Swedia. Ditambah, Partai AKP yang dipimpin oleh Erdogan mencoba untuk mengembalikan semangat Ottoman ke sistem pemerintahan Turki modern (Yanik, 2016). Hal ini dapat dibuktikan dengan orientasi Turki yang cenderung ke Timur Tengah dan negara-negara muslim.

Namun, Turki juga bukan hanya ingin dikenal dengan identitasnya sebagai negara muslim. Perlu diingat bahwa dengan Turki bergabung ke NATO, merupakan salah satu cara bagi Turki untuk memperkuat aliansinya dengan AS dan agar identitas Turki sebagai negara Barat diakui secara internasional. Hal ini bisa dilihat dengan penerimaan Swedia di NATO oleh Turki. Sebelum Turki resmi menerima Swedia, Turki memberikan syarat tambahan bagi Swedia jika ingin pengajuan keanggotaan mereka diterima oleh Turki. Erdogan menginginkan dukungan Swedia bagi Turki

untuk keanggotaan Turki di Uni Eropa. Sudah lebih dari 50 tahun Turki menunjukkan keinginannya untuk bergabung ke Uni Eropa, yang juga ditegaskan oleh ucapan Erdogan bahwa “*First, come and open the way for Turkey at the European Union, and then we will open the way for Sweden, just as we did for Finland,*” (The Times and The Sunday Times, 2023).

Keinginan Turki untuk menjadi negara anggota Uni Eropa semakin mengukuhkan keinginan Turki untuk diakui identitasnya sebagai negara Barat. Hal ini sesuai dengan konsep peran nasional, di mana Turki ingin menempatkan dirinya sebagai peran *central country* dan *global actor* (Kara dan Sözen, 2016). Dalam peran *central country*, Turki ingin dikenal di dunia internasional tidak hanya karena letak geografis atau hanya diasosiasikan pada satu kawasan saja, melainkan Turki sebagai negara dengan identitas regional yang kaya (Kara dan Sözen, 2016). Dalam peran *global actor*, Turki ingin memperluas pengaruhnya di arena global (Kara dan Sözen, 2016).

Keinginan Turki untuk dikenal sebagai negara dengan identitas muslim dan Barat nampaknya cukup kompleks. Islam dan Barat dipandang sebagai dua identitas yang berlawanan, sehingga ini juga tercermin dari keinginan Turki untuk mengharmonisasikan kedua identitas tersebut. Dengan penerimaan keanggotaan Swedia, Turki menunjukkan perannya sebagai negara *bridge*, atau sebagai penghubung bagi negara-negara dengan kultur yang berbeda (Kara dan Sözen, 2016). Hubungan Turki yang dekat dengan Timur Tengah dan juga Barat dapat dipahami sebagai salah satu strategi untuk memenuhi *role expectation* sebagai negara *bridge* dan *global actor*. Dengan insiden pembakaran Al-Qur’an, bisa jadi membawa ketegangan antara Swedia dengan negara-negara muslim di Timur Tengah,. Akan tetapi, karena Turki dapat menempatkan perannya sebagai *leader of the muslim world* dan *defender of the muslim world*, maka Turki dianggap diberikan kepercayaan oleh negara-negara Timur Tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di satu sisi, demi mengukuhkan identitas Barat negaranya, Turki bersedia menerima Swedia untuk menjadi anggota NATO sebagai jaminan mendapatkan dukungan dari Swedia untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Perubahan keputusan Turki terkait keanggotaan Swedia juga bisa didorong karena *role performance* mereka terhadap konstelasi hubungan dengan NATO dan Rusia. Di satu sisi, Turki merupakan bagian dari NATO sejak 1952. Hingga masa pemerintahan Erdogan, Turki berusaha untuk mempertahankan peran dan posisi di NATO sebagai *faithful ally* (Kara dan Sözen, 2016). Di sisi lain, kedekatan hubungan Turki dan Rusia juga menjadi kekhawatiran bagi anggota NATO, dan penerimaan keanggotaan Swedia oleh Turki juga bisa memperumit hubungan mereka dengan Rusia. Akan tetapi, Turki di sini bisa menempatkan negaranya sesuai dengan peran negara *bridge*. Dengan penerimaan Swedia ke NATO oleh Turki, bisa menjadi jaminan bagi NATO agar Rusia dapat mengurangi tingkat ketegangannya dengan NATO karena peran Turki sebagai penghubung antara NATO dan Rusia tersebut.

## **Kesimpulan**

Pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO 2022 sempat terhambat karena penangguhan yang dilakukan oleh Turki. Turki enggan meratifikasi Protokol Akses Kerajaan Swedia ke NATO. Berdasarkan ketentuan dari NATO, semua negara anggota harus menyetujui protokol akses keanggotaan negara yang ingin resmi menjadi anggota NATO. Maka, dengan penolakan dari Turki, keanggotaan Swedia ke NATO harus ditangguhkan. Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi penolakan keanggotaan Swedia ke NATO oleh Turki adalah: (1) Keputusan Swedia untuk tidak mengakui kelompok PKK/YPG (kelompok Kurdi Suriah) sebagai kelompok teroris seperti yang diakui oleh Turki; (2) Pembakaran kitab suci Al-Qur’an di Swedia pada 2023 yang semakin meningkatkan keengganan Turki untuk memberikan persetujuan kepada Swedia; (3) Kekhawatiran Turki akan menurunnya hubungan Turki dan Rusia.

Akan tetapi, setelah menanggukuhkan keanggotaan Swedia selama sekitar dua tahun, Turki resmi menerima keanggotaan Swedia pada 2024. Sebelum resmi menerima Swedia, Turki meminta syarat tambahan kepada Swedia agar terus mendukung keanggotaan Turki di Uni Eropa. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang merujuk pada teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) dan konsep kepentingan nasional menurut Nuechterlein dan konsep peran nasional menurut Holsti, maka dapat dipahami pertimbangan Turki terkait keputusannya menerima Swedia menjadi anggota NATO pada 2024.

Berdasarkan teori pilihan rasional menurut Coleman, perubahan keputusan Turki terjadi karena pemimpin negara memiliki pemikiran rasional untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam konteks ini, individu yaitu Presiden Erdogan memperhitungkan berbagai pertimbangan penerimaan Swedia di NATO secara rasional, dengan didukung oleh anggota Parlemen Turki. Dengan demikian, keputusan untuk menerima Swedia di NATO merupakan keputusan rasional atas dasar kepentingan kolektif yang dibuat oleh individu atas nama kepentingan kolektifnya.

Berdasarkan konsep kepentingan nasional menurut Nuechterlein, perubahan keputusan Turki didorong karena adanya perubahan persepsi Turki terhadap intensitas isu keanggotaan Swedia ke NATO. Turki menganggap dengan menerima Swedia ke NATO, maka dapat memenuhi kepentingan nasional Turki di berbagai sektor. Dengan demikian, isu keanggotaan Swedia di NATO berubah dari yang asalnya isu *peripheral* dan isu *major*, menjadi isu vital yang intensitasnya lebih tinggi. Perubahan intensitas tersebut mendorong *output* yang dikeluarkan berupa perubahan keputusan Turki untuk menerima Swedia ke NATO.

Berdasarkan konsep *national role*, perubahan keputusan Turki bisa dipengaruhi karena adanya kepentingan Turki mengenai perannya di level internasional. Turki ingin mengukuhkan identitas negaranya sebagai negara yang mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dan Peradaban Barat. Dengan menerima keanggotaan Swedia, Turki memandang bahwa hal tersebut dapat mendorong Turki untuk mencapai identitas tersebut.

### Daftar Pustaka

- Akkaya, Ahmet Hamdi. (2020). *The PKK's Ideological Odyssey*. Journal of Balkan and Near Eastern Studies.
- Arbutnot, James. (2008). *The Bucharest Summit and the Future of NATO*. The RUSI Journal, Vol. 153, No. 3.
- Beyoghlou, Kamal A. (2020). *Turkey and the United States on the Brink: Implications for NATO and the US-Turkish Strategic and Military Partnership*. Pennsylvania: US Army War College.
- Brommesson, Douglas, et al. (2022). *Sweden's Policy Neutrality: Success Through Flexibility*. Oxford University Press. <https://academic.oup.com/book/44441/chapter/376663566>.
- Brooke-Holland, Louisa. (2024). *How Do Countries Join NATO?*. House of Common Library, diakses dari [How do countries join NATO? - House of Commons Library \(parliament.uk\)](https://www.parliament.uk/resources/library/how-do-countries-join-nato/).
- Coleman, James S. (1966). *Individual Interests and Collective Action*. Papers on Non-Market Decision Making, Vol. 1.
- Crowley, Michael dan Steven Erlanger dalam The New York Times. (2022). *For NATO, Turkey Is A Disruptive Ally*. Diakses dari [Explainer: Why is Turkey blocking Sweden and Finland NATO membership? | Reuters](https://www.reuters.com/world/europe/turkey-blocks-sweden-finland-nato-membership-2022-07-20/).

- German, Tracey. (2017). *NATO and The Enlargement Debate: Enhancing Euro-Atlantic Security Or Inciting Confrontation?*. The Royal Institute of International Affairs. <https://academic.oup.com/ia/article-abstract/93/2/291/2996078>.
- Hernandez, Gabriela Rosa. (2022). *Finland, Sweden Apply to Join NATO*. Arms Control Today, Vol. 52, No. 5.
- Holsti, K. J. (1970). *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. International Studies Quarterly. Vol. 14, No. 3.
- Kara, Mehtap & Ahmet Sözen. (2016). *Change and Continuity in Turkish Foreign Policy: Evaluating Pre-AKP and AKP Periods' National Role Conceptions*. Uluslararası İlişkiler / International Relations , Vol. 13, No. 52.
- NATO. (2024). *Membership Action Plan (MAP)*. Diakses dari [NATO - Topic: Membership Action Plan \(MAP\)](#).
- NATO. 2024. *NATO Member Countries*. Diakses dari [NATO - Topic: NATO member countries](#).
- NATO News. *NATO Secretary General with Prime Minister of Sweden Ulf Kristersson, 11 March 2024*. Diakses dari [NATO Secretary General with Prime Minister of Sweden se Ulf Kristersson, 11 MAR 2024 \(youtube.com\)](#).
- Nes, John William. (2023). *Turkey's Relations with NATO Under the AKP Government*. Master Thesis. Nordland: Faculty of Social Sciences Nord University.
- Nuechterlein, Donald E. (1976). *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*. British Journal of International Studies. Vol. 2, No. 3.
- Oğuzlu, Tarık. (2013). *Making Sense of Turkey's Rising Power Status: What Does Turkey's Approach Within NATO Tell Us?*. Turkish Studies 14 (4), Routledge. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683849.2013.863420>.
- Persson, Thomas & Sten Widmalm. (2023). *Upon Entering NATO: Explaining Defence Willingness Among Swedes*. Journal of European Security.
- Reiter, Dan. (2001). *Why NATO Enlargement Does Not Spread Democracy*. Journal of International Security. Vol. 25, No. 4.
- Reuters. (2023). *Why is Turkey Blocking Sweden and Finland NATO Membership?*. Diakses dari [Explainer: Why is Turkey blocking Sweden and Finland NATO membership? | Reuters](#).
- Savran, Arin. (2020). *The Peace Process between Turkey and the Kurdistan Workers' Party, 2009–2015*. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 22 (6).
- Simons, Greg, et al. (2019). *Sweden and the NATO Debate: Views From Sweden and Russia*. Routledge, Taylor & Francis Group. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2019.1681014>.
- The Times and The Sunday Times. (2023). *Erdogan Links Sweden's NATO Membership To Turkey's EU Accession*. Diakses dari [Erdogan links Sweden's Nato membership to Turkey's EU accession \(youtube.com\)](#).
- Tuncer, Abdullah Murat. (2022). *Turkey's Options for Finland and Sweden's NATO Membership Applications*. International Journal of Science and Research (IJSR). <https://www.ijsr.net/archive/v11i5/SR22521111020.pdf>.

- Vanhanen, Henri. (2023). *NATO and Northern Europe: No Longer the Forgotten Flank*. Baltic Sea Region Security Initiative. [NATO and Northern Europe: No Longer the Forgotten Flank - Carnegie India \(carnegieendowment.org\)](https://www.carnegieendowment.org).
- Wieslander, Anna. (2021). *"The Hultqvist Doctrine" - Swedish Security and Defence Policy After The Russian Annexation of Crimea*. Routledge, Taylor & Francis Group. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14702436.2021.1955619>.
- Yanık, Lerna K. (2016). *Bringing the Empire Back In: The Gradual Discovery of the Ottoman Empire in Turkish Foreign Policy*. Die Welt des Islams, Vol. 56, Issue ¾.
- Ydén, Karl, et al. (2019). *Sweden and The Issue of NATO Membership: Exploring A Public Opinion Paradox*. Defence Studies 19 (1), Routledge. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14702436.2019.1568192>.
- Yilmaz, Suhnaz. (2012). *Turkey's Quest For NATO Membership: The Institutionalization of the Turkish-American Alliance*. Southeast European and Black Sea Studies 12 (4), Routledge. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683857.2012.741844>.